

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP DATA E-KTP
YANG DISALAHGUNAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT YANG DATA E-KTPNYA DISALAHGUNAKAN
DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

ABSTRAK

Oleh:

Wellysontua Sinaga

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin populer yaitu sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman tersebut di masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder dan didukung oleh data primer.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melihat pengaruh kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data privasi perseorangan dan sangat diperlukan adanya suatu undang-undang tentang Perlindungan Data Privasi yang sudah bersifat mendesak (*urgent*), baik karena alasan kepentingan nasional maupun dalam menerapkan harmonisasi hukum secara internasional dan regional. Dari pengaturan tentang Perlindungan Data Privasi yang tersebar dalam berbagai dokumen internasional yang bersifat global, regional, maupun praktek negara-negara tertentu terdapat kecenderungan adanya standarisasi pengaturan serta adanya unsur-unsur yang sama (*common elements*) yang merupakan prinsip dasar untuk membentuk harmonisasi hukum di dalam bidang perlindungan data privasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pemerintah, E-KTP, Perlindungan Hukum, Hukum Positif

GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR E-KTP DATA USED ABUSE AND LEGAL PROTECTION FOR COMMUNITIES WHICH THE E-KTP DATA IS MISPORTERED ABOUT POSITIVE LAWS IN INDONESIA

ABSTRACT

By:

Wellysontua Sinaga

Indonesia is a state of law, therefore accurate population administration data is very much needed both to carry out the development program plan and for the orderly administration of law in Indonesia. Challenges and threats to the misuse of personal data in Indonesia are increasingly popular, since the Indonesian government has promoted an electronic KTP (e-KTP) program which is a private data recording program by the government where all Indonesian citizens are required to do the recording in their respective domiciles. Personal data recorded in e-KTP has the risk of experiencing data leakage making it vulnerable to misuse by irresponsible parties, especially if there is a lack of security.

This research is a Normative Juridical research with descriptive analytical research. The study was conducted using the conceptual approach and the law approach. The source of research data comes from secondary data and is supported by primary data.

The results of the study can be concluded that looking at the effect of advances in information technology has brought a huge influence on personal privacy data and it is very necessary to have a law on Data Protection that is already urgent (urgent), both for reasons of national interest or in implementing legal harmonization internationally and regionally. From the regulation on Data Privacy Protection that is spread in various international documents that are global, regional, and the practice of certain countries there is a tendency for standardization of regulations and the existence of the same elements (common elements) which are the basic principles for forming legal harmonization in privacy data protection field.

Keywords: Government Responsibility, E-KTP, Legal Protection, Positive Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PRIVASI MASYARAKAT	
A. Hak Privasi	22
B. Hukum Kerahasiaan	25
C. Perlindungan Privasi di Indonesia.....	26
D. Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia.....	28
E. Pengaturan Hak Privasi Dalam di Indonesia.....	34
BAB III: PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN E-KTP	

A. Penyelenggaraan Layanan E-KTP	43
B. Pengaturan Penyelenggaraan E-KTP di Indonesia.....	46
C. Kebijakan E-KTP di Indonesia.....	48
D. Fungsi E-KTP di Indonesia.....	50

BAB IV :”PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP DATA E-KTP YANG DISALAHGUNAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DATA E-KTPNYA DISALAHGUNAKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

A. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Data E-ktip yang Disalahgunakan	57
B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Data E-ktipnya Disalahgunakan	66

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76